

REPRESENTASI KEKUASAAN NEGARA DALAM CERPEN SENO GUMIRA AJIDARMA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI: ANALISIS GRAMSCIAN

Akhmad Rizqi Turama

Universitas Sriwijaya

Email: a.rizqiturama@gmail.com

*Abstract: The question in this research is how the state's power represented in Seno Gumira Ajidarma's short stories before and after the reformation era. The material object is Seno Gumira Ajidarma's *Saksi Mata* and *Aku, Pembunuh Munir*. Analysis done by using Antonio Gramsci's notion called *The Hegemonic Theory*. This theory states that hegemony is a tool to make someone or something becomes powerful by using no violence. The method used in this research is descriptive analysis. The research includes two steps: searching the state's power representation in the short story and compare those representations shown in the short story before reformation and after reformation era. The result of this research shows that there are degradations in the hegemony which is done by the state. People no longer accept the state's domination without criticizing it. Instead, they convert and even play on the state's symbols. Those short stories had successfully shown the hegemonic state in Orde Baru and its lost in reformation era.*

Key words: Seno Gumira Ajidarma, Hegemony, Gramsci.

Abstrak: Masalah dalam riset ini adalah bagaimana wujud representasi kekuasaan negara dalam cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma sebelum dan sesudah reformasi. Objek material yang digunakan adalah cerpen *Saksi Mata* dan *Aku, Pembunuh Munir* karya Seno Gumira Ajidarma. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Hegemoni yang diperkenalkan oleh Antonio Gramsci. Teori ini mengatakan bahwa hegemoni adalah sebuah alat untuk berkuasa secara damai. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Langkah penelitian melingkupi dua hal, yaitu pencarian representasi kekuasaan negara dalam cerpen dan perbandingan representasi yang ada dalam cerpen sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada degradasi dalam hegemoni yang dilakukan oleh negara. Masyarakat tidak sepenuhnya lagi menerima dengan sukarela dominasi negara, sebaliknya masyarakat malah mempermainkan dan memutarbalikkan lambang-lambang negara tersebut. Negara yang begitu hegemonik pada zaman Orde Baru serta mengalami kemerosotan hegemoni dalam era reformasi telah digambarkan dengan baik dalam kedua cerpen ini.

Kata kunci: Seno Gumira Ajidarma, Hegemoni, Gramsci.

PENDAHULUAN

Meskipun karya sastra dianggap sebagai hasil dari imajinasi seseorang, memperhatikan karya-karya sastra (termasuk cerpen) tidak bisa dilepaskan dari realitas-

realitas sosial yang terdapat di sekitarnya karena di dalam karya sastra pasti terkandung unsur realitas tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Scholes (dikutip Hasanuddin, 1996:68) yang mengatakan

bahwa orang tidak mungkin melihat realitas tanpa interpretasi pribadi yang mungkin berhubungan dengan imajinasi, dan orang tidak mungkin berimajinasi tanpa pengetahuan suatu realitas. Berarti tidak ada imajinasi yang murni imajinasi tanpa terpengaruh oleh realitas sosial di sekitarnya. Semakin besar perubahan sosial yang terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan pengaruhnya terhadap karya-karya sastra.

Salah satu momen perubahan sosial tersebut terjadi pada tahun 1998 ketika rezim Orde Baru runtuh dan digantikan dengan rezim reformasi. Orde Baru identik dengan rezim yang otoriter, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Sementara reformasi dianggap sebagai suatu era yang membuka kebebasan dan keterbukaan, hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan negara tidak lagi menjadi sesuatu yang ditabukan dan dilindungi secara otoriter oleh pemerintahnya. Berangkat dari pemahaman Eagleton (2002:7) yang secara tegas menyatakan bahwa karya sastra adalah bentuk-bentuk persepsi, cara khusus dalam memandang dunia; dan juga memiliki relasi dengan cara memandang realitas yang menjadi mentalitas atau ideologi sosial suatu zaman, maka dapat diasumsikan bahwa setelah pergantian rezim tersebut karya-karya sastra juga mengalami pergeseran dalam memandang dunia.

Asumsi tersebut menimbulkan adanya ketertarikan untuk meneliti karya-karya sastra, terutama cerpen, yang lahir sebelum dan sesudah pergantian rezim tersebut dan membuktikan kebenaran pendapat bahwa sastra terpengaruh oleh realitas sosial. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis memilih dua cerpen karya Seno Gumira Ajidarma. Cerpen pertama berjudul *Saksi Mata* yang ditulis pada tahun 1992 dan dianggap sebagai representasi zaman Orde Baru. Cerpen kedua berjudul *Aku, Pembunuh Munir* yang ditulis pada tahun 2013 dan dianggap sebagai representasi dari zaman

reformasi setelah Orde Baru runtuh. Adapun pemilihan kedua cerpen ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Narbuko dan Abu Achmadi (2010:116) bahwa teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang diketahui sebelumnya. Dalam teknik *purposive sampling* ini, penilaian dan pertimbangan peneliti memegang peranan penting karena akan menentukan pengambilan objek. Hal tersebut dikemukakan oleh Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2002:131) yang menyatakan bahwa dalam *purposive sampling* pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti. Dengan berdasarkan pertimbangan bahwa kedua cerpen tersebut cukup merepresentasikan posisi dan kekuasaan negara di dalam karya sastra, maka dipilihlah kedua cerpen seperti yang telah diungkapkan. Penulis juga sengaja mengambil karya yang berasal dari satu pengarang karena beranggapan bahwa realitas sosial, pergantian rezim, mempengaruhi diri seorang pengarang dalam berkarya. Sehingga dengan pemilihan satu pengarang saja, diharapkan dapat tergambar bahwa pandangan dunia pengarang pun bisa berubah, jika asumsi di awal terbukti.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam makalah ini adalah bagaimana wujud representasi kekuasaan negara dalam cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma sebelum dan sesudah reformasi.

Teori Hegemoni Gramsci, secara umum merupakan bentuk penyempurnaan dari teori Marx. Dalam pembicaraan sosiologi sastra teori Marx mendapat posisi yang dominan dibanding teori lainnya. Marx mencetus teori yang dinamakan materialisme historis. Inti teori ini adalah bahwa

perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi (Patria-Arief, 2003:3). Marx percaya bahwa struktur sosial suatu masyarakat, juga struktur lembaga-lembaganya, moralitasnya, agamanya, dan kasusastraannya, ditentukan oleh kondisi-kondisi produktif kehidupan masyarakat itu. Dengan demikian ia membagi masyarakat menjadi infrastruktur atau dasar ekonomik dan superstruktur yang dibangun di atasnya (Faruk, 2010:7). Hubungan antara superstruktur dengan infrastruktur, yakni hubungan yang tidak sejajar dimana superstruktur ditentukan oleh infrastruktur masyarakat yang berupa hubungan produksi.

Seni bagi Marxisme kemudian merupakan bagian dari "superstruktur" masyarakat. Seni merupakan bagian dari ideologi masyarakat—satu elemen dalam struktur persepsi sosial yang sangat rumit yang meyakinkan bahwa situasi di mana satu kelas sosial memiliki kekuasaan terhadap kelas-kelas lainnya yang juga dilihat oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai sesuatu yang "alamiah" atau tidak terlihat sama sekali (Eagleton, 2002:6). Akan tetapi, Marx menganggap hubungan seni dengan struktur ekonomik masyarakatnya sebagai infrastruktur dipahami hanya dalam batas-batas kausalitas ekonomik yang ketat. Sebagai ideologi seni dianggap tidak mempunyai otonomi sama sekali. Kehadirannya ditentukan oleh infrastruktur (Faruk, 2010:10). Bahkan Marx mengklaim dalam analisis terakhirnya bahwa seni ditentukan oleh modal produksi (Eagleton, 17:2002).

Berbeda dengan kaum marxis ortodoks, Gramsci menganggap dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur, bukan hanya sebagai refleksi atau ekspresi dari struktur kelas ekonomik atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri (Faruk, 2010:131). Dengan demikian Gramsci menganggap persoalan kultural dan

formasi ideologis menjadi penting. Hal itu dikarenakan gagasan-gagasan dan opini-opini tidak lahir begitu saja dari otak individu, melainkan punya pusat informasi, iradiasi, penyebaran, dan persuasif. Puncak tersebutlah yang oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni (Faruk, 2010:132).

Secara literer hegemoni berarti "kepemimpinan". Lebih sering kata itu digunakan oleh para komentator politik untuk menunjuk pengertian dominasi, akan tetapi bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep itu untuk meneliti bentuk-bentuk politik, kultural, dan ideologis tertentu, yang lewatnya, dalam suatu masyarakat yang ada, suatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang bersifat memaksa (Faruk, 2010:132).

Pandangan Gramsci mengenai pentingnya kepemimpinan kultural membuatnya mempertimbangkan kembali konsep "superstruktur" dari Marxian (Sugiono, 2006:34). Ia kemudian mengembangkan konsep tersebut sesuai dengan kategori hegemoni. Hal itu membuatnya memilah pengertian superstruktur menjadi "dua level struktur utama": tingkat pertama ia sebut "masyarakat sipil," lainnya adalah "masyarakat politik" atau "negara" (Gramsci, 1971:12).

Bagi Gramsci, kedua level superstruktur tersebut merepresentasikan dua ranah yang berbeda, yaitu ranah persetujuan dalam hal masyarakat sipil dan ranah kekuatan dalam hal masyarakat politik (Sugiono, 2006:35). Kedua alat ini digunakan untuk melegitimasi kekuasaan kelas penguasa agar terus menguasai kelas yang dikuasainya. Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi 'hegemoni' di mana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat, dan di sisi lain berkaitan dengan 'dominasi langsung', atau perintah yang

dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan "yuridis" (Gramsci, 1971:12). Akan tetapi, ranah yang kedua, yakni ranah kekuasaan dengan cara dominasi langsung oleh Gramsci disyaratkan penggunaannya hanya sebagai pilihan terakhir.

Melihat pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hegemoni pada intinya merupakan suatu alat untuk berkuasa dengan cara-cara yang bersifat "damai". Sebuah organisasi konsensus yang dapat diartikan sebagai "suatu relasi, bukan terdiri dari dominasi dengan jalan kekuatan, melainkan persetujuan melalui kepemimpinan politis dan ideologis (Simon, 1982:21).

Proses penguasaan secara hegemoni dapat dilakukan dengan cara menyebarkan ideologi. Menurut Gramsci, penyebaran itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolahan dan pengajaran, kematangan dan ketidakmatangan relatif bahasa nasional dan sebagainya. Pusat-pusat itu bersifat fungsionaris yang mempunyai peranan penting, yaitu mereka kaum intelektual (Faruk, 2010:150). Kaum intelektual ialah mereka yang aktivitas intelektualnya diarahkan untuk memproduksi dan menyebarkan filsafat, teori politik maupun teori ekonomi sebagai sebuah pandangan dunia yang koheren guna mencapai dan memelihara "hegemoni sosial dan pemerintahan politik" (Gramsci, 1971:12).

Dalam teori Gramsci ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni pertama Gramsci berpendapat bahwa di dalam masyarakat selalu ada bermacam-macam ideologi. Kedua, konflik tidak hanya terjadi antar kelas, tetapi juga terjadi antara kelompok-kelompok dengan kepentingan global untuk mendapatkan kontrol ideologi dan politik terhadap suatu masyarakat. Ketiga, untuk menjadi kelompok penguasa,

kelompok tersebut harus mewakili kepentingan umum agar konsensus dicapai dengan persetujuan. Hal itu dapat dibentuk melalui superstruktur, salah satunya adalah karya sastra.

METODE

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah analisis deskriptif. Data berupa kata, frasa, atau kalimat yang didapatkan dari dua cerpen Seno Gumira Ajidarma. Cerpen pertama berjudul *Saksi Mata* yang dimuat dalam harian *Suara Pembaruan* pada tahun 1992. Cerpen kedua berjudul *Aku, Pembunuh Munir* yang dimuat dalam harian *Kompas* pada tahun 2013.

Adapun langkah-langkah penelitian meliputi dua tahap, yaitu: (1) mencari representasi kuasa negara yang ada dalam kedua cerpen, dan (2) membandingkan representasi yang ada dalam cerpen sebelum reformasi dan sesudah reformasi.

PEMBAHASAN

Motif Kehadiran Saksi di Pengadilan

Kedua cerpen ini sama-sama mengangkat masalah hukum di dalam ceritanya. Dua-duanya pun menghadirkan saksi di dalam persidangan, tapi kehadiran saksi di dalam masing-masing cerpen memiliki motif yang berbeda. Pada cerpen *Saksi Mata* sang saksi datang ke pengadilan dengan sukarela dan karena panggilan hati nuraninya, bahkan dijelaskan bahwa sang saksi datang demi keadilan dan kebenaran. Berikut ini kutipan dari adegan yang menunjukkan hal tersebut.

"Sekali lagi, apakah saudara Saksi Mata masih bersedia bersaksi?"

"Saya Pak."

"Kenapa?"

"Demi keadilan dan kebenaran Pak."

(Ajidarma, 1992)

Hal tersebut menjadi sangat berbeda dengan motif kehadiran saksi di dalam cerpen yang berikutnya. Di dalam cerpen kedua, *Aku, Pembunuh Munir*, saksi hadir bukan demi membela kebenaran dan keadilan, malah sebaliknya. Saksi yang hadir hanyalah boneka yang dikendalikan oleh sang pembunuh munir. Seno Gumira Ajidarma juga bahkan menuliskan dialog antara hakim dan saksi yang terkesan konyol dan tidak logis. Dialog yang semacam itu dimunculkan untuk memberi kesan bahwa tidak ada niat yang baik dari sang saksi dalam kehadirannya di persidangan. Hal tersebut dipertegas lagi oleh narator cerpen (tokoh utama) sebagaimana yang ada dalam kutipan berikut.

Nah, aku tidak terlalu keliru bukan? Bahwa percakapan semacam itu merupakan sandiwara yang sungguh-sungguh nyata? Tentulah aku terlibat dalam penyutradaraan sandiwara semacam ini, tetapi janganlah terlalu cepat menebak dan menduga siapakah aku, karena meskipun memang akulah sebenarnya sumber segala sebab kematian Munir, siapakah diriku ini sama sekali tidak penting.

(Ajidarma, 2013)

Ketika pengadilan menjadi representasi negara di dalam cerpen ini, maka motif kehadiran saksi menjadi penting untuk dibahas. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam rezim Orde Baru yang diwakili oleh *Saksi Mata*, saksi datang demi keadilan dan kebenaran. Itu berarti ada sebuah kesegaran dan harapan bahwa pengadilan bisa menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Pengadilan sebagai wakil negara

masih memiliki wibawa yang tinggi di mata masyarakatnya. Hal ini bertolak belakang dengan motif kehadiran saksi pada cerpen kedua yang hanya sebagai boneka dan pemain drama. Cerpen kedua yang mewakili era reformasi menunjukkan bahwa pengadilan hanya sebagai sebuah panggung sandiwara bagi saksi. Negara yang dilambangkan dengan pengadilan tidak lagi dihormati sebagai lembaga yang bisa memberikan keadilan. Sebaliknya, justru keadilan dipertainkan sebagai sandiwara di dalam pengadilan itu.

Wibawa Hakim sebagai Perangkat Negara

Pada cerpen pertama yang mewakili rezim Orde Baru, ada empat kali adegan hakim mengetuk-ngetuk palunya. Setelah hakim mengetukkan palunya, semua orang yang berbicara menjadi tenang dan diam. Berikut ini kutipan pada saat adegan hakim mengetuk palunya untuk yang pertama kali. "Bapak Hakim Yang Mulia, yang segera tersadar, mengetuk-ngetukkan palunya dengan sisa wibawa yang masih ada ia mencoba menenangkan keadaan." (Ajidarma, 1992). Ketika suasana di persidangan kembali bergemuruh, hakim untuk kedua kalinya mengetukkan palu sebagaimana yang ada dalam kutipan berikut. "Hakim mengetuk-ngetukkan palunya. Suara lebah menghilang." (Ajidarma, 1992). Begitu pula pada kali ketiga dan keempat. "Lagi-lagi hadirin ribut dan saling bergunjing seperti di warung kopi. Lagi-lagi Bapak Hakim Yang Mulia mesti mengetuk-ngetukkan palu supaya orang banyak itu menjadi tenang." (Ajidarma, 1992). "Bapak Hakim Yang Mulia segera mengetukkan palu wasiatnya." (Ajidarma, 1992).

Seperti yang telah dinyatakan bahwa setiap kali hakim mengetukkan palunya, setiap kali itu pula peserta sidang menjadi tenang. Peristiwa tersebut dapat diartikan bahwa hakim memiliki wibawa yang diakui oleh segenap hadirin. Ketika hakim dianggap sebagai representasi alat negara, berarti kuasa

negara masih sangat dominan dan diterima oleh masyarakat kewibawaannya. Hal inilah yang tidak lagi didapatkan di dalam cerpen kedua yang merupakan produk pada zaman reformasi. Tidak ada lagi penjelasan mengenai wibawa hakim. Dominasi alat negara sudah memudar. Lebih lanjut, hakim malah mengikuti saja drama yang dimainkan oleh saksi seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Berarti bagian ini juga menunjukkan memudarnya kesukarelaan penerimaan masyarakat pada dominasi alat negara.

Tokoh Utama sebagai Representasi Keberpihakan

Dalam cerpen pertama, yang menjadi tokoh utama adalah seorang saksi mata yang tetap saja hadir dalam persidangan walaupun matanya telah dicongkel dan mengeluarkan darah.

Saksi mata itu datang tanpa mata. Ia berjalan tertatih-tatih di tengah ruang pengadilan dengan tangan meraba-raba udara. Dari lobang pada bekas tempat kedua matanya mengucur darah yang begitu merah bagaikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus menerus dari lobang mata itu.

(Ajidarma, 1992)

Tokoh utama pada cerpen pertama yang protagonis sangat berbeda dengan tokoh utama pada cerpen kedua yang antagonis. Berbeda dengan saksi mata yang mencoba membela keadilan, tokoh utama di cerpen kedua justru adalah seorang pembunuh. "Aku adalah anjing kurap, karena itu aku membunuh Munir." (Ajidarma, 2013). Pusat pengisahan masing-masing cerpen menunjukkan keberpihakan yang berbeda. Cerpen pertama yang berpihak pada lembaga negara, cerpen kedua justru berpihak

antinegara. Cerpen pertama menjelaskan pentingnya untuk membela kebenaran. Cerpen kedua justru memberikan pembenaran atas pembunuhan yang dilakukan. Di cerpen kedua sang pelaku membela diri dengan mengatakan bahwa dia juga adalah manusia yang juga memiliki rasa kasih sayang. Pelaku menyatakan diri hanya jahat di satu sisi, tapi di sisi lain ia juga sama seperti yang lain-lain. Dengan pernyataan itu sang pelaku memberikan pembenaran atas kelakukannya yang menentang negara. Selama kepentingannya dan kepentingan-kepentingan orang lain tidak terganggu, maka perbuatannya bisa dibenarkan. Jadi, di sini dijelaskan bahwa ada kuasa negara yang terdegradasi. Digantikan dengan kuasa kepentingan, meskipun kepentingan itu adalah kepentingan yang busuk sebagaimana yang dinyatakan di dalam cerpen. Ketika di cerpen pertama negara diagungkan, di cerpen kedua negara justru dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan.

Wujud Penjahat dan Kemampuan Negara

Cerpen pertama mengisahkan bahwa sang saksi mata yang hendak menyampaikan kebenaran di hadapan hukum dipersulit langkahnya oleh penjahat yang kemudian mencongkel matanya dengan sendok.

"Mukanya
ditutupi?"

"Iya Pak, cuma kelihatan
matanya."

"Aaaah, saya tahu! Ninja
kan?"

"Nah, itu ninja! Mereka
itulah yang mengambil mata
saya dengan sendok!"

(Ajidarma, 1992)

Pada cerpen kedua, juga ada yang menjegal langkah Munir untuk menguak kebenaran, namun wujudnya adalah berbeda. Wujudnya bukanlah ninja sebagaimana ada dalam cerpen pertama. Wujud yang

dimunculkan sebagai pembungkam kebenaran di depan hukum ini adalah anjing kurap. "Aku adalah anjing kurap, karena itu aku membunuh Munir." (Ajidarma, 2013). Tentu saja keduanya, baik ninja maupun anjing kurap, hanyalah metafora yang digunakan oleh penulis. Namun jika ditelaah lebih lanjut bisa ditemukan adanya unsur kemampuan negara yang disinggung dalam metafor itu. Ketika yang bertindak jahat adalah ninja, yang dikenal sebagai orang-orang yang wajahnya tak kelihatan dan terlatih datang dan menghilang begitu saja, maka akan ada pemakluman jika negara tidak mampu menangkap penjahat-penjahat itu. Hanya saja, ketika yang melakukan kejahatan adalah seekor anjing kurap, anjing yang boleh dikatakan sebagai anjing yang paling hina dan tidak berdaya, maka ini menjadi ejekan bagi negara ketika tidak mampu menangkapnya. Di akhir cerita yang kedua sang tokoh utama mengatakan bahwa dirinya adalah anjing kurap selama tidak mau mengakui kejahatannya. Pada kenyataannya memang tidak ada penjahat yang mengakui kejahatannya. Cerpen kedua yang seolah memaksa sang pelaku kejahatan untuk mengaku dan menampilkan diri, justru mempertegas ketidakmampuan negara dalam menciduk penjahat yang selevel dengan anjing kurap.

Pengadilan sebagai Lambang Negara

Pengadilan pun dalam cerpen ini dapat dianggap sebagai lambang negara. Dalam cerpen pertama lambang negara ini begitu dihargai sehingga ketika ada yang hendak menyatakan kebenaran di hadapan lambang negara ini, para penjahat melakukan tindakan keji terhadap sang saksi.

Ketika hari sudah menjadi malam, saksi mata yang sudah tidak bermata itu berdoa sebelum tidur. Ia berdoa agar kehidupan yang fana ini baik-

baik saja adanya, agar segala sesuatu berjalan dengan mulus dan semua orang berbahagia. Pada waktu tidur lagi-lagi ia bermimpi, lima orang berseragam Ninja mencabut lidahnya—kali ini menggunakan catut.

(Ajidarma, 1992)

Hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam cerpen kedua, ketika pengadilan sebagai lambang negara hanya dijadikan bahan olok-olok dan menjadi panggung sandiwara. Lebih lanjut dinyatakan bahwa panggung drama itu disutradarai oleh seorang penjahat yang tentu saja menentang negara.

Sehingga terjadilah kegemparan yang berlanjut dengan drama pengadilan. Drama, ya, drama dalam dua pengertian: dapat disebut drama karena memenuhi persyaratan dramatik dalam seni pertunjukan; dan bisa disebut drama karena penuh dengan kepura-puraan, bersandiwara dalam kehidupan sebenarnya. (Ajidarma, 2013)

Tampak dari kedua kutipan tersebut adanya ketimpangan. Pada masa Orde Baru pengadilan dihargai sebagai sebuah institusi yang mampu menegakkan keadilan sehingga ditakuti oleh para penjahat. Sementara pada masa reformasi pengadilan tidak lagi ditakuti oleh penjahat, malah orang-orang jahat adalah pemegang kemudi dalam jalannya pengadilan. Dengan demikian, tidak ada lagi rasa hormat terhadap representasi negara tersebut.

SIMPULAN

Maka jelaslah bahwa dalam cerita menunjukkan adanya degradasi dalam hegemoni yang dilakukan oleh negara. Masyarakat tidak sepenuhnya lagi menerima dengan sukarela dominasi negara, sebaliknya masyarakat malah mempermainkan dan memutarbalikkan lambang-lambang negara tersebut. Maka dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan bahwa pendapat Eagleton (2002:7) yang secara tegas menyatakan bahwa karya sastra adalah bentuk-bentuk persepsi, cara khusus dalam memandang dunia; dan juga memiliki relasi dengan cara memandang realitas yang menjadi mentalitas atau ideologi sosial suatu zaman telah terbukti melalui analisis yang telah dilakukan terhadap kedua cerpen ini. Negara yang begitu hegemonik pada zaman Orde Baru serta kemerosotan hegemoni tersebut dalam era reformasi telah digambarkan dengan baik dalam kedua cerpen ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Faruk. 2005. *Pengantar Sosiologi Sastra*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin. 1996. *Drama Karya dalam Dua Dimensi*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. (Terj) Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.